

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH DALAM PENGIMPLEMENTASIAN PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA GLOBAL

Yulius Rustan Effendi
Universitas Negeri Malang
Email: efenrust@gmail.com

Abstract: This article aims to explain descriptively and critically related to strengthening character values and transformational leadership strategies of principals in strengthening character values in the global era. These two research points are assessed as a school strategy for metamorphosis to change the paradigm of education through revitalization and transformation of educational values. Achieving character education values such as intellectual maturity, strong, and competitive self-character. The method of writing this article is to critically discuss the results of research based on relevant studies. The validity of the data is to find the meaning of the data, based on the depth of fact from the findings of the relevant researchers, and to discuss the appropriateness of the meaning and its relevance to conditions in Indonesia. The study results explain several important points such as; (1) the importance of the role of the principal's transformational leadership in strengthening self-character, such as building a positive and inspirational school culture through the provision of high motivation and achievement; (2) increasing collaboration between teachers and changing teachers' attitudes towards their work in a more positive direction; (3) as a charismatic change agent flexibly of thinking and acting; (4) build teacher confidence; (5) guidance and direction to teachers, staff, and students; (6) acting on the basis of a value system; (7) optimizing intellectual stimulation to deal with complicated and unclear situations in the global era; (8) have new ideas, new ways, new practices in integrating character values in the curriculum, extracurricular and co-curricular activities in schools; (9) the spirit of a model in behavior to be imitated by students through habituation and exemplary practices by teachers in schools.

Key words: transformational leadership, principal, implementation of character, education, global era

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif dan kritis terkait penguatan nilai karakter dan strategi kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam penguatan nilai karakter di era global. Kedua poin penelitian ini dinilai sebagai strategi sekolah untuk bermetamorfosis mengubah paradigma pendidikan melalui revitalisasi dan transformasi nilai-nilai pendidikan. Tercapainya nilai-nilai pendidikan karakter seperti kematangan intelektual, karakter diri yang tangguh, dan kompetitif. Metode penulisan artikel ini adalah dengan membahas secara kritis hasil penelitian berdasarkan kajian-kajian yang relevan. Keabsahan data adalah untuk menemukan makna data, berdasarkan kedalaman fakta dari temuan peneliti terkait, dan membahas kesesuaian makna dan relevansinya dengan kondisi di Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan beberapa poin penting seperti; (1) pentingnya peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam penguatan karakter diri, seperti membangun budaya sekolah yang positif dan inspiratif melalui pemberian motivasi dan prestasi yang tinggi; (2) meningkatkan kerjasama antar guru dan mengubah sikap guru terhadap pekerjaannya ke arah yang lebih positif; (3) sebagai agen perubahan karismatik yang fleksibel dalam berpikir dan bertindak; (4) membangun kepercayaan diri guru; (5) bimbingan dan arahan kepada guru, staf, dan siswa; (6) bertindak atas dasar sistem nilai; (7) mengoptimalkan stimulasi intelektual untuk menghadapi situasi yang rumit dan tidak jelas di era global; (8) memiliki ide baru, cara baru, praktik baru dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler di sekolah; (9) semangat menjadi teladan dalam berperilaku untuk ditiru oleh siswa melalui pembiasaan dan keteladanan oleh guru di sekolah..

Kata kunci: kepemimpinan transformasional, kepala sekolah, implementasi karakter, pendidikan di era global

Diskusi mengenai fenomena kemanusiaan dan pemanusiaan tidak dapat dihindarkan dari pelaksanaan pendidikan. Pendidikan dinilai sebagai proses pemanusiaan menuju lahirnya insan bernilai secara kemanusiaan (Danim, 2006). Eksistensi kemanusiaan seseorang tidak saja terfokus pada keberadaannya yang tanpa makna, tetapi kebermaknaan eksistensi kemanusiaan manusia terletak pada pengaktualisasian nilai (sifat) kemanusiaannya. Pengaktualisasian nilai kemanusiaan ini hanya dapat dimunculkan melalui konsientisasi pendidikan (Dewey, 1909). Pendidikan sebagai fundasi dasar bangunan kemanusiaan universal, hadir dalam keseluruhan proses perubahan (*change*) yang melewati dua tahapan. Pertama, proses *hominisasi* dalam wujud kesadaran reflektif potensial diri manusia, dan kedua proses *humanisasi* dalam wujud kesadaran aktivitas aktual kemanusiaan manusia (Driyarkara, 1982). Pada tataran humanitas, pengafirmasian pendidikan global mengarah pada proses pembebasan dan pengangkatan manusia dari kondisi *sub-human* kepada kondisi *human* pada satu sisi dan mendatangkan ambivalensi nilai pada sisi yang berseberangan.

Ingin mengejar ketertinggalan untuk menyamai kualitas pendidikan Internasional, kenyataannya Indonesia dalam keterbatasannya belum siap untuk mencapai kualitas tersebut. Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan bagi keterbukaan peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia, sementara Perguruan Tinggi di Indonesia belum mampu menjawab tuntutan menjadi Perguruan Tinggi yang diperhitungkan di mata dunia, demikian halnya dengan lulusan perguruan tinggi belum mampu bersaing dengan tenaga pendidik dari berbagai manca negara. Hal lain, dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi, yang berdampak munculnya tradisi serba instant, sehingga memunculkan manusia Indonesia yang kompeten untuk meniru karya orang dan tidak mampu berkreasi dan berinovasi; globalisasi melahirkan suatu golongan-golongan di dalam dunia pendidikan, sehingga menghambat kesempatan mengenyam pendidikan berskala internasional bagi masyarakat kelas rendah; semakin terkikisnya kebudayaan akibat

masuknya budaya luar, mengakibatkan kebudayaan Indonesia mengalami gegar budaya. Karena itu globalisasi perlu dicermati dalam konsep Giddens (2003) yaitu menjadi media untuk meningkatkan persamaan, bukan dikutuk untuk meningkatkan ketidaksetaraan; globalisasi mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara, sehingga dipertaruhkan *national building*. Dalam konteks ini pendidikan di era global dipostulatkan sebagai proses pematangan kualitas hidup terhadap nilai dan norma yang benar dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif (Tafsir, 2006).

Era ini jika dirunut dalam kerangka pikir kaum *futurist*, dinobatkan sebagai abad pencerahan pengetahuan (Rawls, 1993). Pengetahuan menjadi senjata ampuh yang memosisikan manusia dalam lingkaran perubahan paradigmatis yang saling menggeser. Menghadapi kemajuan yang ada diperlukan perubahan melalui revitalisasi dan transformasi pendidikan ke arah pembentukan karakter diri yang kuat, tangguh dan berdaya saing. Arah perubahan ini bertujuan untuk mempersiapkan kondisi empirik, perilaku peserta didik yang sedang tergerus dalam arus dekadensi moral (Solomon, et. al., 1988).

Berdasarkan kajian data Kemendikbud (2010) tuntutan pendidikan karakter di sekolah didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja sekolah menengah atas (SMA) dalam masyarakat, seperti perkelahian massal antar-pelajar dan antara pelajar, penggunaan narkoba, pergaulan bebas, nilai kejujuran semakin memudar (menyontek, mencuri, bolos), nilai tata susila dan etika sopan santun dalam berkomunikasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat merosot hilang, kekerasan dan anarkis yang dilakukan oleh kelompok teman sebaya, etos kerja semakin tidak bernilai, perilaku merusak diri (seks bebas, bunuh diri, memeras). Kondisi dekadensi moral ini di kota-kota besar tertentu, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan.

Fakta empirik kemerosotan moral ini, dapat saja menimbulkan penilaian bahwa sekolah, orang tua, masyarakat telah gagal mempersiapkan generasi muda masa depan

bangsa. Secara umum, ada empat kelemahan yang membuat pendidikan karakter tidak optimal. Pertama, guru tidak sepenuhnya mengerti bagaimana memadukan nilai karakter dalam semua mata pelajaran. Kedua, silabus dan rencana pelajaran bekerja secara konvensional dalam proses pembelajaran sesuai dengan gaya guru yang tidak memfungsikan ulang pelaksanaan silabus dan rencana pelajaran, sehingga pesan implementasi nilai karakter tidak sesuai target. Ketiga, pendidikan masih berorientasi kognitif dan kurang memperhatikan perkembangan sikap. Keempat, ada anggapan kuat bahwa jika aspek pengembangan kognitif dilakukan dengan benar, aspek afektif juga akan berkembang. Ini adalah asumsi yang salah untuk perkembangan afektif secepat perkembangan kognitif ketika pengalaman belajar afektif diberikan sebanyak pengalaman belajar kognitif (Suyanto, 2012).

Selain itu pendidikan karakter di sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai, dan belum secara optimal pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain pendidikan karakter belum mencapai tataran pembudayaan berkarakter. Pendidikan etika keluarga yang lemah. Bagi kebanyakan anak, orang tua adalah guru moral pertama dan "periode vakum" moral akan terjadi jika orang tua gagal menunjukkan perilaku moral yang baik. Keluarga disfungsi yang kekurangan anggota yang peduli, pendidikan yang tidak mencukupi, polusi media, dan tekanan teman sebaya berkontribusi pada degradasi nilai karakter di kalangan remaja.

Menanggapi fakta ini, sekolah perlu proaktif dan strategis bermetamorfosis untuk mengubah paradigma baru arah dan tujuan pendidikan, yaitu pada pembentukan pengetahuan dan kepribadian peserta didik melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter. Harapan ini dipertegas dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Klausul Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan di setiap jenjang, termasuk di sekolah harus diselenggarakan secara sistematis demi pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri (*soft skill*).

Selain itu, perlu pula mengokohkan amanat INPRES No. 1 Tahun 2010 tentang Penguatan Metodologi dan Kurikulum Nasional, menegaskan bahwa "penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran berbasis budaya lokal sangat perlu untuk membentuk kekokohan karakter bangsa". Melalui penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran, capaian pembelajaran (*learning outcomes*), dari keseluruhan implementasi pendidikan karakter, terjawab dalam penegasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional pada Pasal 12 Ayat 3, menyebutkan bahwa, pendidikan dasar, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; (c) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; (d) sehat, mandiri, dan percaya diri; (e) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang, termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai karakter yang ada harus dimiliki oleh peserta didik, sebagai wujud tanggungjawab sekolah untuk memulihkan citra sekolah dalam mengatasi kemerosotan moral yang terjadi pada diri peserta didik.

Karena itu perlu dan mendesak meredesain dalam gambaran *grand design* model rencana, kegiatan, evaluasi pembelajaran, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Beberapa

alasan sekolah perlu mengambil peran ini, yaitu: (1) sekolah merupakan tempat persemaian dan pertumbuhan benih *religiositas*-spiritual peserta didik. Keutuhan pribadi spiritual peserta didik tercermin pada tiga dimensi relasional yang mencakup; relasi interpersonal dengan Allah sebagai *homo religious* (Erikson, 1958; Hegel, 1807/1979); relasi sosial dengan sesama sebagai *homo socialae* (Tony, 2015); dan relasi pribadi dengan keutuhan alam semesta (*homo naturale*) (Solomon, et. al., 1988). Ketiga dimensi relasional spiritual ini menyatu dalam keutuhan karakter pribadi manusia sebagai makhluk transformatif dan adaptif (*homo concers*) (Hegel, 1807/1979; Erikson, 1958). Tatanan nilai religiositas ini diimplementasikan melalui redesain model pembelajaran berbasis nilai-nilai agama, pengkondian lingkungan sekolah, pembiasaan dan peneladana sikap damai yang didasarkan pada rasa cinta, bersaudara dalam keberagaman di antara sesama, saling menghormati dan bekerjasama meskipun berbeda agama dan keyakinan, menghargai keutuhan ciptaan melalui gerakan cinta lingkungan, dan memerjuangkan rasa keadilan terhadap orang kecil melalui latihan dan pembiasaan berbuat amal dan mengunjungi anak-anak yatim piatu (Kemendikbud, 2010). (2) Sekolah merupakan wadah pemberdayaan manusia peserta didik. Peran sekolah dalam hal ini, mendidik, mengajar, melatih dan menanamkan nilai kejujuran, cinta, kebenaran, kesetiaan, konsistensi moral, tidak korup, berkeadilan, berbela rasa dengan sesama (Lickona, 1996). Karena itu peran guru, sebagai pendidik yang profesional dalam mendesain pembelajaran berkarakter baik dalam kegiatan ko-kurikuler, ekstrakurikuler, maupun intrakurikuler. Selain itu, kehadiran guru sebagai pribadi yang dapat digugu dan ditiru dalam berperilaku yang baik dan benar, sehingga tertanam nilai-nilai pribadi yang humanis dalam diri peserta didik (Schaps, et. al., 2004). (3) Sekolah sebagai lingkungan yang kondusif untuk mempraktikkan pembelajaran cinta tanah air/nasionalis (menghargai kebersatuan tanpa primordialisme sempit, menjaga keutuhan dalam kebersatuan dalam bingkai ke-Indonesia-an yang lebih toleran.), kemandirian, disiplin, berpikir etis, menjunjung

tinggi nilai-nilai moral, mengedepankan kesetiaan, tanggungjawab, dan peduli. Pada tataran ini, peran semua komponen baik pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah, dan masyarakat perlu menciptakan budaya sekolah yang damai, harmonis, dan taat hukum.

Sejalan dengan keinginan tercapainya pembudayaan nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik secara integral dan berkesinambungan, selain dukungan dari pihak guru, pegawai, dan masyarakat, kehadiran peran kepala sekolah sebagai pemimpin juga menjadi kunci penentu keberhasilan. Kontribusi kepala sekolah sebagai kunci keberhasilan, nampak pada perannya dalam memotivasi, mengkoordinasi, mendorong, dan memengaruhi seluruh komponen sekolah dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter (Maxwell & Thomas, 1991). Peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam pengimplementasian pendidikan karakter menurut Avolio, et. al., (1991); Styron, et. al., (2011); Valentine et. al., 2011; Versland, (2013), nampak dalam beberapa peran penting seperti: (1) perancang pembelajaran berkarakter melalui penetapan kebijakan; nilai-nilai inti karakter sekolah; mendesain perangkat, model, dan penilaian pembelajaran berkarakter baik kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler. (2) Membangun kerekanan kerja seperti; menghindari kondisi kerja yang bersifat menekan, dengan mengkondisikan situasi kerja yang membangun kepercayaan diri; menghindari kebiasaan banyak bicara, tetapi dibuktikan dengan kemampuan kerja profesional; mengurangi kebiasaan marah, cemburu, dan iri hati, sebaliknya memberi motivasi agar kerja para guru lebih efektif; menghindarkan diri dari kebiasaan menyalahkan guru, tetapi harus mampu membetulkan (mengoreksi) kesalahan guru dan menghindarkan diri agar tidak menyebabkan pekerjaan guru menjadi membosankan, tetapi sebaliknya justru harus mampu membuat suasana kerja yang membuat guru tertarik dan betah melakukan pekerjaannya berdasarkan sistem nilai (*values system*) yang luhur, sehingga semua unsur yang ada di sekolah bersedia, tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam mencapai

tujuan ideal sekolah. (3) Membangun kemitraan sekolah dengan pemerintah dan masyarakat melalui program habituasi dalam pengkondisian lingkungan sekolah yang berkarakter. Dalam hal ini kontribusi kepala sekolah dalam jalinan kemitraan, akan mengubah sekolah sebagai lahan persemaian nilai-nilai kebajikan, tempat bertumbuh dan mengakarnya keunggulan nilai moral dan kecerdasan iman serta pikiran (saling menghormati, etika bajikan, keteraturan diri, dan kesesuaian kata dan tindakan) dapat terwujud (Brata & Imron, dkk., 2017).

METODE

Artikel ini dikaji berdasarkan acuan studi hasil penelitian yang relevan melalui review artikel dalam jurnal. Dikatakan relevan karena mempunyai kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi (Woodward, 1977). Review artikel sangat penting, untuk memperkuat teori dan/atau mengidentifikasi pola penelitian yang ada (Baker, 2000). Artikel yang ditinjau oleh penulis dikaji berdasarkan tinjauan sistematis dan meta-analisis (Pawson, et. Al., 2005). Tinjauan sistematis maksudnya secara sistematis penulis mencari hasil penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan spesifik berkaitan dengan pendidikan karakter dan peran transformasional kepala sekolah dalam implementasi pendidikan karakter. Tinjauan sistematis menggunakan pendekatan objektif dan transparan untuk sintesis penelitian, dengan tujuan untuk meminimalkan bias (Bearman, et. al., 2013). Sedangkan tinjauan meta-analisis dilakukan dengan cara menggabungkan hasil penelitian yang diterbitkan sebelumnya untuk melihat efeknya, yang berkaitan dengan implementasi pendidikan karakter dan strategi kepala sekolah dalam mengoptimalkan pendidikan karakter. Keabsahan data dalam kebermaknaannya, dinilai dan diperkuat oleh kedalaman fakta hasil temuan peneliti yang ada, dan mengambil relevansi maknanya agar disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Pada sesi diskusi, kedalaman kajian diskusi diperkuat melalui pendapat para ahli yang dimuat dalam review artikel, sebagaimana yang digambarkan oleh Patton (1987) bahwa, sumber bacaan dipakai

sebagai literatur dalam memperkuat kajian pembahasan untuk menghasilkan analisis penelitian yang mendalam dan bermutu.

HASIL

Penguatan Pendidikan Karakter di Era Global

Globalisasi merupakan proses penyatuan secara menyeluruh keberadaan dunia dalam hunian manusia, baik dalam tataran berpikir, berkomunikasi, maupun bertindak tanpa dibatasi sekat ruang dan waktu, dan berdampak pada perubahan dalam pelbagai bidang kehidupan (Rawls, 1993). Perubahan dalam bidang pendidikan dipostulatkan sebagai proses pematangan kualitas hidup, yang tidak hanya diukur dari kepintaran, tetapi juga dari penghayatan nilai dan norma yang benar dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Schein, 1985; Reeves, 2006; Stromquist, 2002).

Globalisasi pendidikan pada tataran pendidikan karakter merupakan proses konsientisasi diri peserta didik (Freire, 1987). Konsientisasi dalam pandangan Freire ini merupakan konsep pendidikan yang mengutamakan pada tumbuhnya kesadaran peserta didik dalam memandang realitas diri dan lingkungannya sehingga mampu bersikap kritis dan kreatif terhadapnya. Kritis dan kreatif dalam pemikiran Freire (1987), mengakar pada konsientisasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Konsientisasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis pendidikan memosisikan manusia di dunia ini tidak saja *ada-dalam-dunia*, tetap juga *ada-bersama-dunia*, dan pendidikan menjadi ruang dialogis-emansipatoris pedagogik yang memberikan nilai bagi mutu kehidupan peserta didik. Intisari pemikiran Freire ini memosisikan pendidikan karakter sebagai upaya sadar untuk membentuk potensi spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, ketrampilan, dan pengendalian diri secara baik dan menyeluruh dalam diri peserta didik (Soutworth, 2002; Shockley, 2008; Menzies et. al., 2014).

Dalam pemenuhan tuntutan persaingan global, konsientisasi pendidikan melalui pendidikan karakter menjadi visi dan misi penting untuk diprogram di tingkat nasional (Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Pasal 3). Program ini perlu diwujudkan dalam tindakan praktis di tingkat sekolah secara bertahap, menyeluruh, dan

berkesinambungan (Renstra Kemendikbud, 2015). Jika program pendidikan karakter dapat dijalankan dengan baik, maka hakikat kemanusiaan Indonesia lebih bermutu dan disegani di mata dunia. Pengaruh globalisasi meruntuhkan hakikat kemanusiaan masyarakat, karena ukuran globalisasi adalah kemajuan, bukan manusia. Manusia diberi nilai jika mendatangkan kemajuan, tetapi jika tidak maka manusia hanya dianggap sebagai penghalang kemajuan dan patut dilenyapkan. Manusia akhirnya menjadi serigala bagi manusia lain, yang digambarkan Thomas Hobbes (dalam de Waal, 2006) sebagai "*homo homini lupus/Man is wolf to man*".

Hakikat kemanusiaan yang perlu dibentuk melalui pendidikan karakter menurut Foester (dalam Koesoema, 2007), mencakup; *pertama, keteraturan hirarki nilai*, yang mengukur dan menilai *actus humanus* peserta didik pada tingkatan nilai yang ditetapkan. Hal ini tidak dimaksudkan bahwa karakter diri yang baik tidak mengalami benturan keterbatasan manusiawi yang menimbulkan ambigu dan keterpecahan. Yang diharapkan yaitu agar di balik ambiguitas dan keterpecahan diri peserta didik dirahkan melalui pendidikan karakter di sekolah, sehingga tercipta kesadaran humanitas yang mengubah ketidakteraturan menuju keteraturan nilai melalui proses transformasi diri.

Kedua, keteraturan fakta dan gagasanyang menggugat pengkerdilan diri yang mengakibatkan diri tanpa memiliki otonomitas pribadi yang tangguh, bertanggungjawab dan berkarakter kuat. Melalui pendidikan karakter, dibangun konsientisasi koherensi diri sebagai pilihan fundamental untuk mengakarkan kepercayaan pada siapapun termasuk kepercayaan terhadap diri sendiri. Tanpa adanya koherensi, eksistensi diri yang otonom akan digerus oleh kecemasan, ketakutan yang berakibat pada kurangnya kepercayaan terhadap harga diri pribadi. Ketiga, kemandirian. Otonomitas diri, mengacu pada kemandirian jati diri dalam wujud pengintegrasian dan penanaman aturan dari luar diri, melalui kesadaran nilai untuk membangun kemandirian pribadi. Esensi pribadi yang terbentuk melalui pendidikan

karakter, mengokohkan diri pada keputusan mandiri dan otonom tanpa bergantung pada dorongan yang dipaksakan orang lain.

Keempat, kepastian prinsip dan komitmen pada keputusan. Melalui pendidikan karakter membentuk kepastian dan komitmen diri peserta didik. Kepastian dalam prinsip merupakan wujud ketahanan diri dalam memilih dan menentukan apa yang dibutuhkan bagi kebaikan diri. Sebaliknya, komitmen pada keputusan adalah pengakuan diri yang mendasari penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Implementasi Pendidikan Karakter

Sebuah adagium bermakna pendidikan pernah disampaikan Saneca (dalam Hartoko, 1989), seorang filsuf yang hidup di abad ke-3 sebelum Masehi, menandakan "*non scholae sed vitae discimus*", belajar bukan untuk sekolah melainkan untuk hidup. Adagium ini mengikhtikan, bahwa pendidikan merupakan sebuah tindakan fundamental, berupa perbuatan yang menyentuh akar-akar hidup, mengubah dan menentukan hidup manusia. Hidup manusia menjadi bernilai, jika berkarakter, sehingga karakter tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, melainkan diciptakan oleh pendidikan (Bryson (1941). Pendidikan karakter membentuk praksis hidup yang bernilai dan menjadi kekuatan dasar untuk bersaing di era global (Dewey, 2002; Campbell, 2003, Durkheim, 1925; Piaget, 1932; Kohlberg, 1971).

Dalam kenyataan, implementasi pendidikan karakter di Indonesia belum maksimal dijalankan. Menurut Buchori (2007), pendidikan karakter di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia selama ini belum bersifat operasional dan praktis. Dibutuhkan sebuah kajian untuk mencari dan menemukan solusi alternatif yang lebih operasional sehingga mudah diimplementasikan di tingkat sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan studi terdahulu yang dilakukan oleh Bulach (2002); Goldberg (2003), dimana sekolah perlu menyusun *grand design* pendidikan karakter secara jelas dan bersifat empirik, sehingga ada kemudahan dalam memahami konsep dan tidak ambigu dalam menyusun panduan praktis pelaksanaan kegiatan, dan pemberian penilaian.

Berkaitan dengan implementasi praktis pendidikan karakter, Anderson (2000) menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak dapat diajarkan; melainkan terjalin dalam keseluruhan materi kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler disertai ketersediaan lingkungan belajar yang dapat mengintegrasikan keseluruhan inti nilai karakter. Kondisi ini belum terlihat jelas pada sekolah-sekolah tingkat menengah atas (SMA) di Indonesia. Kendala-kendala yang ditemukan menurut Raharjo (2010); Budimansyah (2010); Zubaidi (2011); Koesuma (2011); Sudarminta (2002); Koesuma (2014); yaitu: (1) sekolah belum memiliki struktur organisasi sekolah yang bertanggung jawab terhadap implementasi pendidikan karakter. Hal ini menyebabkan praktik dalam pengelolaan pendidikan karakter serta kebijakan di sekolah sulit dimonitoring keberhasilan, efisiensi dan efektivitasnya; (2) sekolah tidak membuat pertanggungjawaban pengelolaan secara struktural tentang pendidikan karakter; (3) Sekolah belum memiliki sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembagian tugas serta koordinasi pendidikan karakter; (4) sekolah belum menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pada kebijakan, perencanaan, program maupun identifikasi hambatan. (5) sekolah belum memilih dan menentukan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan visi sekolah dan menjabarkan nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dalam indikator yang representatif. Hal itu berdampak pada gerakan membangun karakter di sekolah menjadi kurang terarah dan fokus, sehingga kegiatan monitoring dan penilaiannya belum jelas; (6) guru belum menetapkan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam materi pelajaran yang diampunya. Meskipun ada guru yang telah menetapkan nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran yang diampunya, namun nilai-nilai karakter tersebut belum digali dengan baik dan mendalam; (8) guru memiliki keterbatasan kompetensi dalam merancang perangkat pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang memiliki muatan karakter; (9) guru memiliki kompetensi yang belum memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan intrakurikuler; (10) guru belum dapat menjadi

teladan atas nilai-nilai karakter yang dipilihnya; (11) peran guru untuk menjadi teladan dalam mewujudkan nilai-nilai karakter secara khusus sesuai dengan nilai karakter mata pelajaran dan nilai karakter umum di sekolah belum optimal dipraktikkan. (12) peserta didik belum membudayakan kegiatan *correction fraterna* (kritik/penilaian untuk membangun persaudaraan)

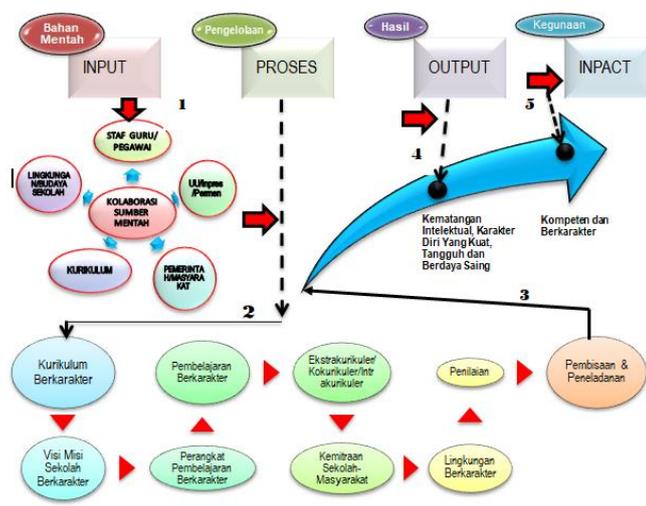
Kendala pengimplementasian pendidikan karakter ini, perlu dikaji dalam kerangka praktis sebagaimana yang digambarkan Vygotsky, (1934/1978); Lave et.al., (1991); Lickona (1996); Kohn (1997); Nash (1997); DeRoche et. al., (1998); Roberts, (1998); Bulach (2002); Goldberg (2003); Campbell (2003) sebagai berikut. (1) sekolah perlu memahami dengan baik nilai-nilai moral universal. (2) sekolah perlu menetapkan tolok ukur standar sekolah (benchmarking). Cara penilaian pendidikan karakter pada peserta didik dilakukan oleh semua guru. Hasil penilaian diinformasikan secara terkoordinasi kepada guru/wali kelas, guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah atau guru lain yang ditunjuk. Penilaian dilakukan setiap saat, baik di kelas maupun di luar kelas, dengan cara pengamatan dan pencatatan.

Sekurang-kurangnya ada tiga aspek penilaian karakter yang membutuhkan kesungguhan dan kecermatan dalam mengevaluasi, yaitu kelakuan, kerajinan dan kerapian; (3), Sekolah perlu mengembangkan pendidikan karakter secara holistik, melalui kegiatan pengembangan fisik (olah raga), intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual (olah hati). (4) Sekolah perlu mengembangkan pendidikan karakter dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkannya berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan. (5) Sekolah perlu mengikutsertakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan (kepala sekolah, guru, pegawai, komite sekolah, dan *stakeholders*, untuk menyepakati nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan, termasuk menyepakati bentuk dan strategi serta pembiayaan pelaksanaan pendidikan karakter. (6) Bertumpu dan responsif pada kearifan lokal dalam keberagaman dan kemajemukan, sehingga bernilai kontekstual dan memberi identitas peserta didik. (7) Mengembangkan

kecakapan-kecakapan untuk hidup, berupa; kecakapan rasional-kritis (*critical ratio*), sosial edukatif (*education social*), kecakapan berbudaya (*culture skill*), termasuk kompetensi bahasa asing (*international language*), dan pencarian dan penemuan dalam pembelajaran (*inquiry and discovery learning*). (8) Dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebinekaan dan perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia. (8) Dikembangkan sejalan dengan perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi. (9) Dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat diamati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. Dalam hubungan ini komunitas sekolah perlu mendeskripsikan keutamaan nilai karakter dalam sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif; mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah; dan mengerahkan sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan. (10) Dinilai dan perlu dilakukan upaya tindak-lanjut demi perubahan perilaku peserta didik. Jika terdapat pelanggaran peserta didik, maka sekolah perlu melakukan penanganan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan upaya tindaklanjutan. (11) Melibatkan petugas piket harian untuk mengontrol perilaku peserta didik; (12) Diperkuat melalui tindakan pembiasaan dan peneladanan seluruh warga komunitas sekolah. (13) Guru sebagai model atau teladan pribadi yang berkarakter; guru yang disiplin, dan mengajarkan sikap disiplin pada peserta didik, maka guru tersebut akan didengar dan dituruti, guru perlu mencintai, menghargai dan menolong peserta didik, mengembangkan kesadaran akan harga dirinya, dengan memperlakukan peserta didik secara bermoral. (14) Dirancang sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami dan dipraktikkan; (15) Guru menerjemahkan teori-teori pembelajaran pada pengembangan perilaku yang konkrit dan efektif. (16) Guru perlumenyelenggarakan pembelajaran dan

bimbingan melalui penjelasan, diskusi kelas, berceritera, pemberian dorongan, dan memberikan respons berupa koreksi jika terdapat perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. (17) Dibangun berdasarkan situasi dan kondisi lingkungan peserta didik. Jika ingin menanamkan karakter nilai keadilan, maka lingkungan sekolah perlu menghindari berbagai bentuk ketidakadilan, menghindari berbagai bentuk kecurangan dan kebohongan seperti, praktik jual beli soal, *marks-up* nilai, pemaksaan pembelian buku pegangan peserta didik, diskriminasi perlakuan terhadap peserta didik berdasarkan agama, suku, kelas sosial. (18) Aturan sekolah perlu bersifat fleksibel, untuk mempertimbangkan perbedaan kepribadian peserta didik yang satu dengan lainnya. Suasana sekolah yang sportif memengaruhi perilaku toleran dalam diri peserta didik, dan terpujuk sikap menghargai perbedaan (kelebihan dan kekurangan) di antara mereka.

Berdasarkan temuan dan diskusi tentang implementasi pendidikan karakter di atas, berikut ini digambarkan alur implementasi pendidikan karakter di Sekolah Menengah Atas (SMA)



Gambar. 1 Model Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Strategi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah

Menjawab eksistensi peran sekolah dalam implementasi pendidikan karakter, secara argumentatif formal dapat dikatakan,

bahwa sekolah sebagai suatu organisasi pendidikan formal merupakan wadah kerjasama sekelompok orang (kepala sekolah, guru, staf, peserta didik, komite sekolah, dan masyarakat) untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Gamage dan Pang, 2003). Dikatakan demikian, karena semua organisasi apapun jenisnya termasuk sekolah pasti memiliki dan memerlukan seorang pemimpin atau manajer yang menjalankan kegiatan kepemimpinan (*leadership*) bagi keseluruhan organisasi sebagai satu kesatuan. Kebutuhan ini membutuhkan sebuah strategi, dan strategi utama dalam kepemimpinan nampak pada kemampuan pemimpin menjalankan fungsi sebagai anggota organisasi (Wahab, 2008).

Kata 'pemimpin' dari rumusan tersebut mengandung makna luas, yaitu kemampuan untuk menggerakkan segala sumber yang ada di sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktik organisasi kata memimpin, mengandung konotasi menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberikan teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan, dan sebagainya.

Istilah transformasional berinduk dari kata *to transform*, yang berarti mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda (Danim, 2006). Transformasional, karenanya, mengandung makna sifat-sifat yang dapat mengubah sesuatumenjadi bentuk lain, misalnya mengubah energi potensi menjadi energi aktual atau motif berprestasi menjadi prestasi riil. Dengan demikian, seorang pemimpin dikatakan telah menerapkan kaidah kepemimpinan transformasional, jika seorang pemimpin mampu mengubah energi sumber daya.

Kepemimpinan transformasional dikembangkan oleh James MacGregor Burns yang digunakan dalam konteks politik (Burns 1978). Selanjutnya Burns mengembangkan konsep kepemimpinan transformasional berlandaskan pada pendapat Maslow yang berkaitan dengan hierarki kebutuhan manusia. Pada tataran ini kepemimpinan transformasional menurut Burns (1978) menargetkan kebutuhan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan akan penghargaan (*self esteem*), yaitu harga diri, rasa memiliki kompetensi dan keahlian, respek, prestise

dan pengakuan dan aktualisasi diri, dengan menggunakan dan mengembangkan seluruh potensi secara sangat kreatif.

Gagasan ini kemudian diperkenalkan dalam konteks organisasional oleh Bass (dalam Berry et. al., 1993). Kepemimpinan transformasional dalam praktik organisasi menekankan pada kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja dengan dan atau melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian yang ditetapkan (Bass et. al., 2006). Sumber daya dimaksud dapat berupa SDM, fasilitas, dana, dan faktor-faktor eksternal keorganisasian. Leithwood, et. al., (2008:78) menjelaskan, "*Transformational leadership is seen to be sensitive to organization building, developing shared vision, distributing leadership and building school culture necessary to current restructuring efforts in schools.*"

Kata kepala sekolah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008), terbentuk dari dua kata, yaitu kata 'kepala' yang berarti 'ketua' atau 'pemimpin' dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan 'sekolah' adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Menurut Narvaez, (2006), kepala sekolah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin pada suatu lembaga satuan pendidikan. Shamir (1991) mengemukakan bahwa kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, tempat diselenggarakan proses belajar mengajar atau terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran.

Peran kepemimpinan transformasional menurut Leithwood (1992); (Brubacher et al., 1994); Bass et. al., (1998) yaitu; (1) mengambil tindakan berdasarkan kesadaran akan apa yang benar dan penting; (2) meningkatkan kedewasaan motivasi melampaui kepentingan pribadi seseorang demi kebaikan sekolah atau masyarakat; (4) berusaha mengoptimalkan kinerja, motivasi, sikap, dan nilai; (5) meyakinkan orang lain untuk menargetkan pencapaian standar moral dan etika yang lebih tinggi; (6) menyusun secara kolaboratif tujuan penting pengajaran dan pembelajaran melalui pemberdayaan seluruh

komunitas sekolah agar menjadi bersemangat dan fokus (Liontos, 1992). (7) memfasilitasi redefinisi misi dan visi masyarakat, pembaharuan komitmen dan restrukturisasi sistem sekolah untuk pencapaian tujuan; (8) mengubah diri menjadi agen moral; (9) berkomitmen terhadap kode etik sebagai standar moral bersama; (9) memperhatikan kebaikan yang dicapai melalui perubahan nilai-nilai keyakinan dan kepuasan tertinggi; (10) membantu anggota staf guru mengembangkan dan memelihara lingkungan sekolah secara kolaboratif dan profesional (11) membina pengembangan guru; dan membantu guru memecahkan masalah dengan lebih efektif.

Berdasarkan kajian studi yang dilakukan oleh Tony dan Marianne (dalam Sumaryani, 2009) dan Tim Penguatan Pendidikan Karakter Kemendikbud (2015) menemukan bahwa strategi kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam pengimplementasian pendidikan karakter di sekolah nampak dalam beberapa langkah strategis untuk mencapai sasaran sebagai berikut.

Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk ikut serta dalam proses perubahan (cara-cara baru) di tubuh organisasi sekolah. Strategi yang digunakan adalah melalui beberapa kegiatan berikut. : (1) melibatkan semua komponen sekolah, seperti guru, komite sekolah, dan *stakeholder* dalam merumuskan visi dan misi sekolah, merujuk pada hasil *stucer study* dan *need asesment* (analisis SWOT). (2) melibatkan semua komponen sekolah, seperti guru, komite sekolah, dan *stakeholder* dalam memilih dan menentukan nilai-nilai karakter sekolah untuk ditanamkan dalam diri peserta didik sejalan dengan arah visi dan misi sekolah. Langkah strategis ini sejalan dengan rekomendasi CEP (2010), dimana seorang kepala sekolah perlu melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk menegaskan nilai inti dan mengartikulasikan tujuan yang berkaitan dengan karakter melalui sekolah; (3) melibatkan semua komponen sekolah, seperti guru, komite sekolah, dan *stakeholder* dalam menyusun struktur organisasi pendidikan karakter melalui penegasan *job description* yang jelas; (4) melaksanakan sosialisasi program terpadu yang sinergis dalam

kerjasama antara dinas pendidikan kota/kabupaten, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, pegawai, peserta didik, komite sekolah, dan *stakeholders*; (4) Bersama guru, pegawai, komite sekolah, dan *stakeholders* menyusun panduan pendidikan karakter yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan ko-kurikuler. Strategi ini digambarkan pula dalam CEP (2010) dimana sekolah perlu membuat rencana untuk pendidikan karakter yang bisa diajarkan di kelas, olahraga, pertemuan, dan kegiatan bersama; (5) pihak pemerintah khususnya melalui kementerian pendidikan baik di pusat, provinsi, daerah/kota perlu memotivasi pihak sekolah agar mematokkan target capaian pembentukan karakter peserta didik, melalui sosialisasi dan pelatihan terbatas; (6) Mewajibkan ketua organisasi pendidikan karakter internal sekolah untuk membuat laporan kinerja kerja dan hasil capaian berupa penilaian terhadap internalisasi nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik.

Sasaran: (1) memiliki visi dan misi sekolah yang memiliki muatan karakter. (2) memiliki rumusan nilai-nilai karakter sekolah yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi sekolah. Sasaran ini sesuai dengan target yang diharapkan oleh CEP (2010) bahwa komunitas sekolah mempromosikan nilai etika dan kinerja inti sebagai dasar karakter yang baik. (3) sekolah memiliki struktur organisasi pendidikan karakter yang resmi beserta pembagian tugas yang jelas; (4) menyelenggarakan pendidikan yang menjawab kebutuhan peserta didik, *stakeholders*, dan tuntutan dunia kerja; (3) memiliki *branding* sekolah terkait pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter; (4) mengintegrasikan tiga program pendidikan (pendidikan karakter, kurikulum 2013, dan *full day school/five day school*) dalam satu paket kurikuler, ko-kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. (5) mengeksplisitkan program penguatan pendidikan karakter yang diturunkan dari KI (Kompetensi Inti), dijabarkan dalam KD (Kompetensi Dasar) dalam standar isi kurikulum. Sasaran ini sejalan dengan penegasan CEP (2010) bahwa sekolah menggunakan pendekatan komprehensif, disengaja, dan proaktif untuk pengembangan karakter (6) memiliki pedoman kerja yang jelas dalam kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta program tindak lanjut yang dipandu oleh rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam pedoman yang ada.

Memberikan dorongan pada bawahan untuk membentuk kelompok sosial dan membentuk tradisi untuk saling mendukung selama proses perubahan. Cara yang dilakukan adalah melalui beberapa kegiatan bersama beberapa pihak berikut. Strategi: (1) memberi kesempatan kepada guru, pegawai untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan agar mampu merumuskan dan mengendapkan nilai-nilai karakter dalam pengajaran yang berkelanjutan. (2) membangun komitmen dalam berperilaku sejalan dengan endapan nilai karakter dalam kegiatan internalisasi teori dan diwujudkan dalam keseluruhan target capaian visi dan misi sekolah.

Sasaran: (1) meningkatkan kompetensi guru tentang konsep dan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter secara menyeluruh; (2) meningkatkan kompetensi guru dalam memilih gambaran karakter melalui penyatuan sistem dan model pembelajaran yang diajarkan; (3) meningkatkan perilaku hidup guru sebagai teladan sejalan dengan internalisasi nilai yang melekat dalam dirinya sebagai buah dari kepakaran pada bidangnya, dan gambaran karakter secara keseluruhan sejalan dengan visi dan misi sekolah. Pengintegrasian Penguatan Pendidikan Karakter dalam kurikulum

a). Kepala Sekolah

Sasaran: (1) mengembangkan nilai-nilai karakter sekolah yang dijabarkan dalam indikator yang representatif; (2) memiliki rumusan nilai-nilai karakter dalam indikator-indikator pencapaian kompetensi dasar, dengan menggunakan kata-kata kerja operasional yang sesuai dengan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif dalam konteks KTSP; (3) memiliki rumusan nilai-nilai karakter dalam indikator-indikator pencapaian kompetensi dasar, dengan menggunakan kata-kata kerja operasional yang sesuai dengan aspek sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan ketrampilan dalam konteks K'13; (4) memiliki keseragaman silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan penggunaan metode pembelajaran, evaluasi dan rencana tindak lanjut; (5) memiliki keseragaman khususnya penempatan penanaman nilai-nilai karakter

pada langkah-langkah inti pembelajaran; (6) memiliki dokumen pedoman tata tertib peserta didik, dengan berbagai ketentuan *reward* dan *punishment* yang selalu dievaluasi dan dirubah sesuai dengan perubahan temuan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik; (7) menyediakan layanan akses internet dan sumber bacaan lain; (8) memiliki tenaga guru bimbingan konseling

Strategi: (1) melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terhadap guru melalui latihan pemilihan kata kerja dalam menyusun indikator, dan diimplementasikan dalam pengajaran ; (2) menggiatkan kegiatan Musyawara Guru Mata Pelajaran dalam kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran, (Silabus, RPP, penyusunan soal, evaluasi dan rencana tindak lanjut); (3) menyusun dokumen pedoman tata tertib peserta didik dengan melibatkan semua komponen sekolah; (4) menyusun jadwal kegiatan harian atau mingguan untuk memperkuat nilai-nilai utama PPK yang telah dipilih sebagai upaya penguatan secara habituasi dan terintegrasi; (5) menyesuaikan program kurikulum, terutama program di siang dan sore hari yang dimasukkan dalam dokumen kurikulum sekolah; (6) membuat rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan PPK dan menyesuaikan dengan kalender akademik sekolah; (7) membuat dan menyepakati komitmen bersama antarsemua pihak (kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, serta komite sekolah dan semua komponen yang ada di sekolah), serta para pemangku kepentingan pendidikan untuk mendukung dan melaksanakan PPK sesuai dengan strategi implementasi yang sudah direncanakan, baik secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler b). Guru (pendidik); (1) mewujudkan budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter; (2) memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter; (3) menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian yang mengintegrasikan nilai-nilai utama penguatan pendidikan karakter; (4) menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif; (5) memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari

pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter; (6) mendukung terbentuknya relasi yang baik antarpendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam kelas maupun di luar kelas; (7) membangun lingkungan belajar yang mengapresiasi dan menghargai keunikan individu; (8) mengoptimalkan fungsi kelompok kerja guru (KKG) dan musyawara guru mata pelajaran (MGMP) untuk pengembangan pembelajaran berbasis penguatan pendidikan karakter; (9) mengembangkan kegiatan kokurikuler berbasis penguatan pendidikan karakter; (10) melaksanakan program ekstrakurikuler berbasis penguatan pendidikan karakter; (11) mengoptimalkan peran dan fungsi bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter; dan (12) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter.

c). Tenaga kependidikan: (1) memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter; (2) mendukung terbentuknya relasi yang baik antartenggota kependidikan, pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam lingkungan satuan pendidikan; dan (3) mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis penguatan pendidikan karakter.

d). Komite Sekolah: (1) memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter; (2) mendukung pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter secara mandiri dan gotong royong; (3) mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis penguatan pendidikan karakter; (4) mendukung pelaksanaan kebijakan lima hari sekolah; (5) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter.

e). Komunitas masyarakat dan organisasi profesi: (1) memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter; (2). memberikan dukungan pada satuan pendidikan dalam pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter; (3). menjadi mitra dan/atau relawan satuan

pendidikan dalam pelaksanaan program penguatan pendidikan sesuai dengan kompetensi dan profesi masing-masing; dan (4). melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter.

Berdasarkan pemikiran di atas, Maehr & Anderman (1993); Maehr dan Fyans (1989; (Maehr & Midgley, 1991) dalam (Mulyasa, 2007); Wahjosumidjo (1999); Hermino (2016), menegaskan beberapa esensi peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam memberikan kekuatan nilai karakter di sekolah pada era global, yaitu; 1) menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk memetakan arah baru, menanggapi tantangan sekarang dan masa depan melalui: (a) Membangun kultur sekolah yang positif dan inspiratif. Kultur sekolah yang positif (*positive school culture*) dan inspiratif diasosiasikan dengan: (1) motivasi dan prestasi siswa yang tinggi, (2) meningkatkan kolaborasi antarguru, dan (3) mengubah sikap guru terhadap pekerjaannya ke depan untuk menjadi lebih positif. (b) Agen perubahan (a change agent) yang karismatik dalam cara berpikir dan tindakan yang fleksibel, membangun kepercayaan, bimbingan dan pengarahan kepada guru, staf, dan peserta didik demi mencapai kemajuan sekolah (c) Bertindak atas dasar sistem nilai, (bukan atas dasar kepentingan individu, atau atas dasar kepentingan dan desakan kroninya). (d) Memiliki kemampuan sebagai wujud dari stimulasi intelektual untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas, dan tidak menentu. (e) Memiliki visi ke depan, dengan selalu menemukan ide-ide baru, cara baru, praktik-praktik baru dalam proses belajar-mengajar di sekolah. 2) Menumbuhkan ciri dan nilai; melalui pikir logis, ekspresif dan penuh gairah (Deal & Peterson, 1994). Peran teknis kepala sekolah meliputi perencana, pengalokasi sumber daya, koordinator, supervisor, pembesar, ahli hukum, penjaga gerbang, dan analis. Sehubungan dengan peran simbolis, kepala sekolah dianggap sebagai sejarawan, detektif antropologis, visioner, simbol, penyair, aktor, dan pemimpin (Fullen, 1996). Selain sifat-sifat ini, Deal & Patterson (1994) berpendapat bahwa ada juga nilai-nilai tertentu yang dibutuhkan kepala sekolah sebagai pemimpin di era global yaitu;

(1) keterbukaan terhadap partisipasi;(2) keterbukaan terhadap keragaman;(3) keterbukaan terhadap konflik; (4) keterbukaan terhadap refleksi; (5) keterbukaan terhadap kesalahan. 3). Kepala Sekolah sebagai agen perubahan:sebuah budaya tanpa perselisihan adalah budaya yang ditakdirkan untuk stagnan, karena perubahan selalu dimulai dengan ketidaksepakatan (Champy, 1995). (4) *Kepala sekolah sebagai manajer*:kepala sekolah yang baik mengetahui pentingnya manajemen. Dalam sistem manajemen berbasis sekolah, dimana guru dan administrator bekerja sama untuk menetapkan kebijakan dan agenda pendidikan untuk sekolah, tanggung jawab bukan lagi berada di pundak kepala sekolah tetapi tersebar di antara kelompok. (5) *Kepala sekolah memberikan pendidikan inklusif*: membangun hubungan yang bermakna dengan beragam anggota komunitas sekolah. Aspek penting lain dari hubungan antara kepala sekolah dan komunitas sekolah adalah bahwa kepala sekolah berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran peserta didik, guru dan orang tua terhadap realitas komunitas sekolah melalui pertemuan informasi, acara orientasi, buletin, surat kabar, atau buku pegangan sekolah.

KESIMPULAN

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan di bidang pendidikan mengakar tunggalkan pendidikan karakter sebagai tujuan akhir. Sejalan dengan maksud ini, klausul undang-undang sistem pendidikan nasional, mengikhtiarkan pendidikan di sekolah perlu diangkat pada tataran usaha sadar untuk membantu peserta didik menjadi pribadi yang otonom, berilmu dan berkarakter. Eksistensi keutuhan jati diri manusia dipostulatkan dalam penampilan diri yang otonom, integratif, dan humanistik dalam kekayaan pribadi yang ber-Tuhan, bermoral, dan berpikir jernih. Titik tekannya adalah implementasi pendidikan karakter perlu diwujudkan dalam kehidupan konkrit yang langsung dirasakan dan dipraktikkan oleh peserta didik. Dalam tataran konsep dan praktik, implementasi pendidikan karakter menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Hal ini ditegaskan agar perlu menempatkan kurikulum dan metode pembelajaran sebagai alat penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai hidup yang syarat dan berakar pada norma dan tata kesusilaan, sehingga

terbentuk karakter yang kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman yang menantang dan kompleks.

SARAN

Strategi kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam pengimplementasian pendidikan karakter di Sekolah Menengah Atas (SMA) nampak dalam beberapa langkah strategis yaitu; memberikan kesempatan kepada bawahan untuk ikut serta dalam proses perubahan di tubuh organisasi sekolah melalui beberapa kegiatan penguatan karakter; memberikan dorongan padabawahan untuk membentuk kelompok sosial dan membentuk tradisi untuk saling mendukung selama proses perubahan melalui beberapa kegiatan bersama dalam membentuk sekolah yang berkarakter; dan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, penataan manajemen kelas, gerakan literasi, menciptakan lingkungan sekolah yang berkarakter, dan kegiatan bimbingan konseling

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, S., M.1998. *Service learning: A national strategy for youth development*. Washington: Open University Press
- Avolio, B. J., Waldman, D. A., & Yammarino, F., J. 1991. The four I's of Transformational Leadership. *Journal of European Industrial Training*, 15(4), 9-16.
- Bahm, K. L 2012.The Integration Of Character Education And Its Impact On teachers' professional practice. *University of missouri-st. Louis*. Dissertation
- Baker, P. 2000. Writing a Literature Review. *The Marketing Review*.1 (2): 219–247.
- Bass, B. M., & Steidlmeier, P. 1998. Ethics, Character and Authentic Transformational Leadership. [Http://cls.binghamton.edu.BassStead.htm](http://cls.binghamton.edu.BassStead.htm) l.pp. 1-25 (printed).
- Bearman, M., Dawson, P. 2013. "Qualitative synthesis and systematic review in health professions education". *Journal of Medical Education*. 47 (3): 252–60.doi:10.1111/medu.12092. PMID 23398011
- Berkowitz,M., W.,& Bustamante, A. 2013.Using research to set priorities for

- character education in schools: A global perspective. *KJEP Special Issue* hlm. 7
- Berry, G., & H. 1993. Leadership and The Development of Quality Culture in Schools. New South Wales Department of School Education, Seven Hills, Australia *International Journal Of Educational Management*, 1997, 52-64.
- Blanchard, K., & Stoner, J. 2004. The Vision Thing: Without It You'll Never Be a World-Class Organization. *Leader to Leader*. 2 (2) hlm.21-28
- Briggs A., R., J., Clark, J. & Hall, I. 2012. Building Bridges: Understanding Student Transition to University. *Quality in Higher Education*, 18:1, 3-21, DOI:10.1080/13538322.2011.614468 (On line). Diakses, 8 Pebruari 2018).
- Brubacher, J., W., Case, C., W., Reagan, T. G. 1994. *Becoming a Reflective Educator*. How to Build a Culture of Inquiry in the Schools. California: Corwin Press, Inc
- Budimansyah, D. 2010. *Pendidikan Karakter*. Bandung: Alfabet
- Bulach, C. 2002. Implementing a Character Education Curriculum and Assessing its Impact on Student Behavior. *The Clearing House*, 76(2), 79-83.
- Burns, J., M. 1978. *Leadership*. New York: Harper & Row
- Campbell, E. 2003. *The Ethical Teacher*. New York: Open University Press.
- Champy, J., b. 1995. *Reengineering Management*. New York, NY: Harper Collins.
- Character Education Partnership. 2002. *Eleven principles of effective character education*. Retrieved July 28, 2002, from <http://www.character.org/principles/>
- Character Education Partnership. 2010. *Leading a National Call to Character*. Press Contact: Rebecca Sipos (202) 296-7743 ext. 20 <http://www.character.org/2010Forum>
- Clark, R. 2003. *The Essential 55*. New York: Hyperion
- Danim, S. 2006. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Deal, T., & Peterson, K. 1992. *The Leadership Paradox*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- De Waal, Frans. 2006. *Primates and Philosophers: How Morality Evolved*. Princeton University Press. p. 3. ISBN 0691124477. Retrieved 14 July 2015.
- DeRoche, E., & Williams, M. 1998. *Educating Hearts and Minds: A Comprehensive Character Education Framework*. Thousand Oaks, California: Corwin Press.
- Dewey, J. 1909. *Democracy and Education*. New York: The Free Press.
- Diah, P., N., Brata, Ali I., Ahmad S., K., H., Imron, A. 2017. Headmaster Leadership Behavior in Strengthening Character Values In Vocational High School. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 6, Ver. 6 (June. 2017) PP 07-12e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845*. www.iosrjournals.org
- Durkheim, E. 1925. *The Sociology of Education*. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hill.
- Driyarkara. 1980. *Pendidikan*. Kanisius: Yogyakarta
- Erikson, E. 1958. *Young Man Luther: A Study In Psychoanalysis and History*. New York: W. W. Norton.
- Freire, P. 1987. *A Pedagogy for Liberation: Dialogues on Transforming Education*. The United State America: Bergins & Garvey Publishers, Inc
- Fullen, M. 1996. Leadership for Change. In *International Handbook of Educational Leadership and Administration*. Netherlands: Kluwer Academic Publishers
- Gamage, D., T., & Pang, K. S., N. 2003. *Leadership and Management in Education*. Hongkong: Chinese University Press.
- Giddens A. 2003. *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*, Washington, DC: Taylor & Francis
- Hartoko, D. 1989. *Memahami Manusia Muda*. Yogyakarta: Gunung Mulia.
- Hegel, G. 1807/1979. *Phenomenology of spirit*. Oxford: Oxford University Press.
- Hermino, A. 2016. *Asean Economic Community In The Perspective Of*

- Transformational Leadership In School. *International Journal of Education and Research*. Vol. 4 No. 6 June (online). Accessed, 10 Pebruari 2018.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Penguatan Metodologi dan Kurikulum Nasional
- Kemendikbud. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka
- Kemendikbud. 2005. *Rencana Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025*. Jakarta: Kemendikbud
- Kemendikbud. 2010. *Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Tim PPK Kemendikbud
- Koesoema, D., A. 2007. *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koeseoma. D., A. 2011. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Kanisius
- Kohlberg, L. 1971. Moral Development and Moral Education. Dalam, G. Lesser (ed.). *Psychology and Eduvational Practice*. Chicago: Scott, Foresman. *Phi Delta Kappan*, v78 n6 p428-39 Feb 1997
- Kohn, A. 1997. How Not to Teach Character Education: A Critical Look at Character Education. *Phi Delta Kappan*, Vo. 78., 428-439.
- Lave, J., & Wenger, E. 1991. *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge, UK: Cambridge University Press
- Leeuw, G. V., d. 1933/1986. *Religion in essence and manifestation* (trans: Turner, J. E.). Princeton: Princeton University Press.
- Leithwood, K. A. 1992. The Move Toward Transformational Leadership. *Educational Leadership*, vol. 49, no.5, pp. 8-12.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. 2008. Seven Strong Claims About Successful School Leadership. *School Leadership and Management*, 28(1), 27N 42. doi:10.108011363243070180060
- Lickona. 1996. *Raising Good Children: From Birt Through The Teenage Years*. New York: Bantam Books.
- Liontos, L., B. 1992. Transformational Leadership. *ERIC Digest*, Number 72. [Http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digest/ed347636.html](http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digest/ed347636.html)
- Mason, M. 2013. Educational inequality and educational quality. *International Journal of Educational Development*. www.elsevier.com/locate/ijedudev. (Online). (34) 1-2. Accessed, 5 Pebruari 2018.
- Megawangi. 2004. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Yayasan Obor
- Maxwell, T.W., & Thomas, A.R. 1991. School Climate and School Culture. *Journal of Educational Administration*. Vol. 29 Iss: 2
- Menzies, J., L., & Baron, K. 2014. International Postgradutae Student Transition Experiences: The Importance of Student Societies and Friends. *Innovations in Education and Teaching International*, 51(1), 84-94.
- Schein, E. 1985. *Budaya Organisasi dan Kepemimpinan: A Dinamis View*. San Francisco, CA: Jossey-Bass
- Mulyasa, E. 2007. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narvaez, D. 2006. Integrative Ethical Education. In M. Killen & J. Smetana (Eds.), *Handbook of Moral Development* (pp. 703-733). Mahwah, NJ: Erlbaum
- Nash, R. 1997. *Answering the "virtuecrats": A moral conversation on character education*. New York: Teachers College Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional
- Patton, M., Q. 1987. *Qualitative Evaluation Methods*. London: Sage Publications.
- Pawson, R., Greenhalgh, T., Harvey, G., Walshe, K. 2005. Realist review - a new method of systematic review designed for complex policy interventions. *Journal of Health Services Research & Policy*. 10: 21-34. doi:10.1258/1355819054308530. PMID 16053581.
- Piaget. 1932. *The Aims of Pysicology Education*. New York: Cambridge University Press.
- Raharjo. 2010. Pendidikan Karakter sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia. dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional, Vol.16 No.3 Mei
- Rawls, J. 1993. *Political liberalism*. New York: Columbia University Press.
- Reeves, B., D. 2006. *The Learning Leader: How To Focus School Improvement For Better Results*. North Beauregard St.

- Alexandria: ASCD-Express
- Roberts, J., K. 1998. *Thurstone's method of equal-appearing intervals in measuring attitudes: An old method that is not forgotten*. Paper presented at the annual meeting of the MidSouth Educational Research Association (New Orleans, LA, November 4-6, 1998).
- Seyyed H., N. 1992. *Intelektual Islam: Teologi, Filsafat, dan Gnosis*. Yogyakarta: CIIS Press
- Schaps, E., Battistich, V., & Solomon, D. 2004. Community in school as key to student growth: Findings from the Child Development Project. In J.E. Zins, R.P. Weissberg, M.C. Wang, & H.J. Walberg (Eds.). *Building academic success on social and emotional learning*
- Schein, H., E. 1985. *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco : Jossey-Bass Publishers
- Shockley, K., G. 2008. Africentric Kepemimpinan Pendidikan: Teori dan Praktek. *International Journal of Kebijakan Pendidikan dan Kepemimpinan* .Vol. 3, No 3.<http://www.ijepi.org> .(On line). Diakses, 5 Februari 2018.
- Solomon, D., Watson, M., Delucchi, K., Schaps, E., Battistich, V. 1988. Enhancing children's prosocial behavior in the classroom. *American Educational Research Journal*, 25, 527-554
- Soutworth, G. 2002. Kepemimpinan Instruksional di Sekolah: Refleksi dan Bukti Empiris. *Sekolah Kepemimpinan dan Manajemen* , 22 (1), 73-92.
- Stromquist, P., N. 2002. *Education In A Globalized World: The Connectivity Of Economic Power, Technology, and Knowledge*. The United States Of America: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Strike, K. 1996. The Moral Responsibilities Of Educators. In J. Sikula, T. Buttery & E. Grifon (Eds.), *Handbook Of Research On Teacher Education*. (2nd Ed., Pp. 869-882). New York: Macmillan
- Styron, R., & Styron, J. 2011. Critical Issues Facing School Principals. *Journal of College Teaching and Learning*, 8(5), 1-10.
- Sumaryani, C. 2009, *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Iklim Organisasi Sekolah terhadap Produktivitas Sekolah*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto.2012. Urgensi Pendidikan Karakter. <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html> (diunduh tanggal 6 Pebruari 2018).
- Tony, K.2015. God and Human Freedom; A Kierkegaardian Perspective. New York: *Theology and Religion. American University Studies*. Vol. 354 Series 7: ISBN 978-1-4331-3064-9VI, 95 pp .
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Valentine, J., & Prater, M. 2011. Instructional, Transformational, And Managerial Leadership and Student Achievement: High School Principals Make a Difference. *NASSP Bulletin*, 95(1), 5-30. doi:10.1177/0192636511404062
- Tafsir, A.2006. *Filsafat Pendidikan Islam, Integrasi Jasmani, Ruhani da Qalbu, Memanusiakan Manusia*, Cet. Ke-1, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Turan, S., & Bektas, F. 2013. The Relationship Between School Culture and Leadership Practices. *Eurasian Journal of Educational Research*, 52, 155-168.
- Versland, T. 2013. Principal Efficacy: Implications For Rural 'Grow Your Own' Leadership Programs. *The Rural Educator*, 35(1), 13-22
- Wahab, A., A. 2008. *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan: Telaah Terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan*. Bandung: ALFABETA
- Wahjumisumidjo.1999. *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Woodward, A., M. (1977). The Roles of Reviews in Information Transfer. *Journal of the American Society for Information Science*, 175-180.
- Zubaidi.2011. *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasi dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.pustaka. Yayasan Obor Indonesia.